

High-Level Operation: Planning and Successfully Seizing Sovereignty. Case Study: Venezuela

Joseph Robert Giri
Poltekad Malang

Corresponding Author: Joseph Robert Giri berthadira@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Decapitation Strategy; Deterrence, High-Level Operation, International Law, Structural Realism

Received : 27, January

Revised : 29, February

Accepted: 31, March

©2026 Giri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

On January 3, 2026, Operation Absolute Resolve against the president of Venezuela illustrates how a High-level Operation is used to weaken a country's center of gravity. This phenomenon raises a significant question: the mechanisms of international law enforcement and states with low deterrence capacity. While it is common for research papers to describe military interventions and issues of justifying the use of force, there are still few studies that integrate the aspects of operational planning, weaknesses in law enforcement, and a state's deterrence capacity simultaneously within a single causal framework. This article explores high-level operations; the weakness of international law enforcement mechanisms and military law that affect the legitimacy of military actions; and their impact on state sovereignty. This article seeks to construct an integrative analytical model based on structural realism, strategy as a political-military bridge, deterrence theory, and decapitation strategy. This article adopts an explanatory qualitative research design with a structured causal model and process tracing. The object of this study is military operations against heads of state, with Venezuela as the case study. The analysis is conducted using indicators of intelligence accuracy, integration of various units, deterrence capacity, and counter-actions under international law. Thus, the findings of this article indicate that the success or failure of an operation depends not only on the quality and scale of the operation itself, but also on the weakness of international law enforcement mechanisms and the deterrence capacity of the target state. The implication for Indonesia is the need to strengthen its deterrence infrastructure, intelligence integration, defense cooperation, and diplomatic efforts to safeguard national sovereignty from intervention by superpowers

High-Level Operation: Perencanaan dan Kesuksesan Menculik Kedaulatan. Studi Kasus: Venezuela

Joseph Robert Giri
Poltekad Malang

Corresponding Author: Joseph Robert Giri berthadira@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Deterrence, Hukum Internasional, Operasi Tingkat Tinggi, Realisme Struktural; Strategi Decapitation.

Received : 27, January

Revised : 29, February

Accepted: 31, March

©2026 Giri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Pada tanggal 3 Januari 2026, Operasi Absolute Resolve terhadap presiden Venezuela menggambarkan bagaimana Operasi Tingkat Tinggi atau High-level Operation dimanfaatkan untuk melemahkan pusat gravitasi atau center of gravity suatu negara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan signifikan, yaitu: mekanisme penegakan hukum internasional dan negara-negara dengan kapasitas pencegahan atau deterrence rendah. Meskipun umum bagi makalah penelitian untuk menggambarkan intervensi militer dan masalah pembenaran penggunaan kekuatan, namun masih sedikit studi yang memadukan aspek perencanaan operasional, kelemahan penegakan hukum, dan kapasitas deterrence suatu negara secara bersamaan dalam satu kerangka kausal. Artikel ini mengeksplorasi high-level operation; lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional dan hukum militer yang mempengaruhi legitimasi tindakan militer; dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Artikel ini berupaya membangun model analitis integratif yang didasarkan pada realisme struktural, strategi sebagai jembatan politik-militer, teori pencegahan atau deterrence, dan strategi pemenggalan atau decapitation. Artikel Ini mengadopsi desain penelitian kualitatif eksplanatori dengan model kausal terstruktur dan pelacakan proses. Objek dalam studi ini adalah operasi militer terhadap kepala negara, kasusnya adalah Venezuela. Analisis dilakukan menggunakan indikator akurasi dalam intelijen, integrasi berbagai satuan, kapasitas deterrence, dan kontra-aksi hukum internasional. Dengan demikian, hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa apakah operasi berhasil atau gagal bergantung tidak hanya pada kualitas serta tingkat operasi, tetapi juga bergantung pada lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, dan kapasitas deterrence negara target. Implikasi untuk Indonesia adalah menekankan perlunya memperkuat infrastruktur deterrence, integrasi intelijen, kerjasama pertahanan, dan upaya diplomasi untuk menjaga kedaulatan negara dari intervensi negara adidaya

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan strategis global yang berubah selama satu dekade terakhir menekankan kecenderungan persaingan antar negara yang dapat merusak tatanan internasional, dan penggunaan instrumen militer ataupun tindakan sewenang-wenang dalam mencapai tujuan politik (DoD, 2018). Mengenai Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat, tugas utama keamanan nasional ke depan lebih didasarkan pada persaingan strategis antar negara daripada isu terorisme yang mengemuka pada era sebelumnya (DoD, 2018).

Pada tanggal 3 Januari 2026, pasukan elit militer Amerika Serikat (Delta Force) melakukan penculikan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas. Peristiwa ini merupakan bagian dari drama geopolitik baru dan memicu perdebatan hukum internasional. Hampir 50 tentara Venezuela serta sekelompok staf keamanan Kuba dilaporkan tewas dalam operasi militer yang terkait dengan penculikan Presiden Maduro (AP News, 2026).

Hal ini menunjukkan dimensi konflik militer yang lebih mendalam. Di sini operasi militer yang diarahkan terhadap kepala negara sebagai Center of Gravity. Menurut Strange (1996), center of gravity adalah sumber utama kekuatan moral atau fisik suatu entitas. Menargetkan pemimpin negara dalam high-level operation selanjutnya disebut sebagai strategi pemenggalan atau decapitation, yang bertujuan secara langsung untuk mempengaruhi stabilitas rezim secara strategis.

Secara konseptual, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang penggunaan kekuatan lintas batas negara, yang dibenarkan adalah jika kekuatan militer digunakan untuk membela diri (Syofyan, 2017). Namun dalam praktiknya, pengaruh kekuasaan suatu negara atas wilayah geografis negara lain seringkali lebih menentukan (Snow, 2018). Kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional, bagaimanapun, menciptakan ruang terbuka bagi negara-negara adidaya untuk bersikap koersif. Namun bagi negara-negara dengan kekuatan menengah seperti Venezuela –dan relevan (atau reflektif) bagi Indonesia –kerentanan kedaulatan bukan hanya muncul dari persoalan hukum atau kebijakan; kerentanan kedaulatan juga berkaitan dengan kapasitas daya tangkal atau deterrence (Gray, 2003).

Sementara itu, doktrin pertahanan Indonesia sendiri menekankan perlunya kekuatan pertahanan terintegrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015; 2022). Artikel ini menyiratkan analisis inklusif pada high-level operation terkait dengan strategi militer, hukum internasional, serta kapasitas deterrence dari negara target.

Rumusan Masalah

Isu inti dalam studi ini adalah bagaimana keberhasilan high-level operation dapat mengungkap kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional dan menggambarkan bagaimana kerentanan negara-negara dengan kapasitas deterrence rendah.

Gap Penelitian

Beberapa kajian sebelumnya secara ekstensif meneliti intervensi militer dari sudut pandang hukum internasional (Syofyan, 2017) dan dinamika distribusi kekuasaan dalam sistem internasional (Snow, 2018). Dan studi tentang deterrence yang menyoroti pentingnya kredibilitas dan persepsi lawan sebagai faktor penentu utama efektivitas deterrence (Gray, 2003; Milevski, 2021), namun belum ada penelitian yang melakukan pembahasan secara terpadu terkait:

- Kecanggihan perencanaan dan eksekusi high-level operation;
- Kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional; dan
- Kapasitas deterrence negara target

dalam satu model analitis yang menjelaskan keberhasilan high-level operation secara komprehensif. Kekosongan ini menjadi ruang kontribusi artikel ini.

Pertanyaan Penelitian

Mengingat latar belakang dan masalah, artikel ini berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kunci. Pertama, apa saja fitur dari high-level operation dalam intervensi militer modern, yang ditujukan secara langsung kepada pemimpin negara sebagai pusat gravitasi atau center of gravity? Kedua, apa dampak dari lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional terhadap legitimasi politik dan hukum dari operasi semacam itu? Ketiga, bagaimana kapasitas deterrence negara target mempengaruhi keberhasilan operasi ini?

Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk merangkum perencanaan dan pelaksanaan high-level operation dalam hal strategi militer modern, menghubungkan tujuan politik dan penggunaan kekuatan militer. Artikel ini juga menggambarkan lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional dalam merespons penggunaan kekuatan lintas batas negara, dan mengaitkan kapasitas deterrence dengan kerentanan kedaulatan suatu negara. Akhirnya, sebagai kesimpulan, studi ini berusaha memberikan pemahaman tentang implikasi strategis bagi negara-negara berdaya tangkal atau deterrence menengah, termasuk Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Utama

Paradigma teoretis dominan yang digunakan dalam studi ini adalah realisme struktural. Menurut Kenneth Waltz (1979), sistem internasional saat ini cenderung bersifat anarkis karena tidak adanya otoritas supranasional yang secara efektif dapat menegakkan kepatuhan negara-negara untuk tunduk terhadap norma hukum internasional. Dalam struktur seperti ini, distribusi kapabilitas – terutama kekuatan militer – yang akan mengatur perilaku negara. Norma hukum internasional tetap relevan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan militer dan aliansi. Ketika kekuatan sangat tidak seimbang, maka negara-negara super power dapat menggunakan kekuatan militer secara koersif untuk mencapai tujuan strategis mereka.

Pandangan ini dilengkapi dengan pendekatan teori strategis seperti yang diuraikan oleh Colin S. Gray (1999, 2003). Strategi bukan hanya rencana militer, tetapi merupakan keseluruhan proses yang memastikan bahwa tindakan operasional menghasilkan dampak politik yang diinginkan. Dengan menyoroti

penggunaan kekuatan militer pada tingkat pemimpin negara dalam high-level operation, kita dapat menyadari bahwa ini adalah sebuah pilihan strategis, efektif dan efisien yang ditujukan langsung pada center of gravity politik lawan. Oleh karena itu, tindakan militer semacam ini adalah sarana yang rasional untuk mencapai tujuan politik.

Teori Menengah

Pada tingkat menengah, teori deterrence menjelaskan bagaimana negara-negara dapat membatasi agresi atau intervensi dari negara lain melalui ancaman balik yang dapat menghasilkan konsekuensi yang dapat diprediksi oleh agresor. Schelling (1966) berpendapat bahwa deterrence bergantung pada kemampuan negara untuk mempengaruhi citra lawan mereka tentang konsekuensi yang akan diterima. Tidak hanya kemampuan militer, tetapi juga menggunakannya keteguhan sikap, kemauan politik dan diplomasi sebagai dasar kredibilitas.

Keberhasilan prinsip deterrence bersifat kontingen, yaitu bergantung pada keputusan rasional dari pihak lawan. Dengan demikian negara yang memiliki kemampuan deterrence terbatas akan dilihat sebagai target dengan risiko pembalasan yang rendah (Gray, 2003). Sementara itu, Hukum internasional secara historis menyebut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar larangan penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Piagam PBB menyatakan bahwa kekuatan militer harus dibatasi hanya untuk pertahanan diri atau di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Lauterpacht (dalam Syofyan, 2017) menyoroti peran penting dari aturan hukum sebagai landasan sistem internasional. Namun, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, terkait dengan kepentingan negara-negara adidaya, menyebabkan penerapan norma-norma ini menjadi tidak seragam. Pertarungan antara norma hukum dan distribusi kekuasaan lah yang sebenarnya menentukan lingkungan operasional dari tindakan militer lintas batas negara.

Teori Terapan

Dalam konteks operasional, teori strategi decapitation menjelaskan pola kontemporer dalam operasi militer yang cenderung berfokus pada pemimpin politik atau militer dan menggunakan itu sebagai sumber kohesi dan legitimasi rezim. Johnston (2012) mencatat bahwa strategi ini mengasumsikan bahwa pemimpin negara adalah center of gravity, yang menopang aparat komando, moral, dan stabilitas politik. Negara penyerang bertujuan untuk melumpuhkan elemen ini guna memaksimalkan efek strategisnya tanpa perlu perang konvensional yang berkepanjangan.

Namun strategi decapitation tidak selalu menghasilkan keruntuhan organisasi. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi dan kohesi internal kelompok sasaran (Jordan, 2009).

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Strange (1996) mengenai center of gravity sebagai sumber utama kekuatan moral dan fisik suatu entitas. Strategi yang diambil dalam high-level operation untuk menangkap kepala negara dalam kasus tersebut tidak hanya taktis tetapi juga strategis, yang menciptakan gangguan sistemik. Keberhasilan semacam itu sangat bergantung pada kecanggihan perencanaan operasi, respons penegakan hukum internasional, dan kapasitas deterrence negara target.

Metodologi studi baru ini, mengintegrasikan realisme struktural, teori strategi, deterrence, hukum internasional, dan strategi decapitation, membentuk kerangka analisis terpadu, yang menjelaskan dinamika keberhasilan high-level operation dalam sistem internasional yang anarkis dan kompetitif.

Kerangka Pemikiran

Variabel Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa high-level operation tidak berhasil hanya karena militer negara tersebut lebih unggul, tetapi ada faktor operasional dan faktor sistemik berinteraksi dengan kapasitas negara sasaran.

Variabel independen pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan high-level operation. Secara strategis, keberhasilan suatu operasi terutama didasarkan pada kemampuan untuk secara efektif menghubungkan tujuan politik dengan instrumen militer (Gray, 1999), meliputi Integrasi intelijen, pusat gravitasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan suatu operasi bergantung pada identifikasi yang tepat tentang sumber kekuatan utama lawan (Strange, 1996). Sehingga dalam hal ini, menargetkan kepala negara sebagai center of gravity adalah penerapan strategi yang membutuhkan kecanggihan pada level operasional. Semakin baik perencanaannya dan semakin efektif pelaksanaannya, semakin besar kemungkinan tujuan tercapai.

Variabel independen kedua adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Dalam sistem masyarakat internasional yang anarkis, tidak ada satu titik kendali yang mampu menegakkan aturan secara andal (Waltz, 1979). Meskipun Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan lintas batas tanpa otorisasi Dewan Keamanan, atau tanpa alasan pembelaan diri. Namun praktiknya sebagian besar didasarkan pada konsentrasi otoritas politik dunia (Syofyan, 2017). Ketika hal ini tidak berhasil dan digagalkan oleh veto politik, maka akan membuka ruang negara adidaya untuk bermanuver. Jadi, kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional juga akan meningkatkan peluang keberhasilan operasi militer lintas batas negara.

Variabel intervening atau penyeimbang yaitu kemampuan deterrence negara target. Deterrence menurut Schelling (1966) didasarkan pada kapasitas untuk mengubah pandangan lawan tentang konsekuensi negatif yang akan diterima. Gray (2003) juga menunjukkan bahwa deterrence bersifat kontingen, karena efektivitasnya muncul dari persepsi rasional pihak lawan sehubungan dengan keuntungan dan kerugian atas tindakan agresif yang akan dilakukan. Kapasitas deterrence, meliputi kekuatan militer, aliansi strategis, dan dukungan politik. Sebaliknya, kapasitas deterrence yang rendah menciptakan keberanian yang mendorong motivasi untuk melakukan intervensi ataupun agresi. Dalam konteks ini, kapasitas deterrence adalah faktor yang memoderasi atau memperkuat efek dari faktor operasional dan sistemik terhadap hasil akhir.

Variabel dependen yaitu keberhasilan operasi militer negara adidaya. Keberhasilan didefinisikan tidak hanya dalam hal target fisik yang dicapai dalam hal menangkap (atau menetralkan) target tetapi juga dalam efek strategis yang dihasilkannya, yaitu melemahnya legitimasi rezim, dan perubahan dalam keseimbangan regional. Johnston (2012) menunjukkan bahwa efektivitas keberhasilan decapitation tidak hanya bergantung pada keberhasilan taktis

jangka pendek atau penghancuran, tetapi juga tentang gangguan sistemik yang berkelanjutan.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menempatkan kecanggihan operasional sebagai faktor langsung, kelemahan hukum internasional sebagai faktor sistemik yang memperluas ruang lingkup tindakan, dan kapasitas deterrence sebagai faktor penyeimbang yang bisa menghambat atau meningkatkan keberhasilan operasi.

Hipotesis

Dari hubungan antara variabel-variabel ini, penulis percaya bahwa tingkat keberhasilan High-Level Operation oleh negara-negara adidaya secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat desain strategi dan efektivitas operasional, dan diperkuat oleh kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional. Sedangkan alasan kontra di balik ini adalah kapasitas deterrence dari negara target, yang dapat menghambat tingkat keberhasilan operasi.

Novelty

Artikel ini membangun model integratif dari dimensi kapasitas operasional, sistemik, dan strategis sebagai pendorong kritis keberhasilan sebuah high-level operation. Sebagian besar studi sebelumnya hanya membahas tentang target kepala negara memiliki fokus militer dan intelijen (Johnston, 2012). Demikian juga, studi hukum internasional hanya memusatkan perhatian pada legitimasi normatif tanpa kaitan langsung dengan hasil strategis.

Artikel ini memberikan pandangan yang lebih luas dengan mengkonseptualisasikan high-level operation sebagai semacam gangguan terhadap kedaulatan negara. Dan memperluas realisme struktural dengan mengintegrasikan lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional sebagai variabel sistemik yang mempengaruhi kemungkinan keberhasilan dalam operasi militer. Hukum internasional diposisikan bukan hanya sebagai norma tetapi sebagai faktor struktural yang efektivitasnya dibentuk oleh distribusi kekuatan militer. Ini juga memunculkan gagasan bahwa kapasitas deterrence adalah variabel antara yang berpengaruh terhadap intervensi militer negara-negara adidaya.

Dalam mensintesis ketiga dimensi ini, artikel ini menawarkan kerangka analitik untuk memahami dinamika high-level operation dalam persaingan antar-negara saat ini.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk memastikan hubungan kausal antara tiga dimensi utama: kecanggihan perencanaan dan pelaksanaan high-level operation (X1), kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional (X2), dan kapasitas deterrence negara sasaran (Z), dan mengaitkan dengan tingkat keberhasilan high-level operation (Y). Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat disederhanakan dengan formula berikut:

$$Y = X1 + X2 - Z$$

Pendekatan model kausal terstruktur melengkapi penelusuran proses, sebuah teknik analitis yang menelusuri urutan peristiwa terkait dengan

kompleksitas suatu peristiwa untuk mengidentifikasi pola dan mekanisme kausal yang paling mungkin menjelaskan fenomena yang diamati (Waldner dan Lust, 2018). Studi kasus merupakan metode yang tepat untuk menguji mekanisme kausal dalam fenomena kompleks dengan variabel yang saling berinteraksi dalam konteks nyata (Gerring, 2007).

Analisis data ini terdiri dari pencocokan pola untuk memberikan kesimpulan empiris bagi proposisi teoretis yang dirumuskan, dan triangulasi data untuk memverifikasi konsistensi dalam analisis serta validitas inferensi kausal antara variabel penelitian.

Subjek dari analisis ini adalah operasi militer terhadap pemimpin negara, yang dalam penelitian ini disebut sebagai *high-level operation* – tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan atau melumpuhkan *center of gravity* lawan. Objek empiris penelitian ini adalah Operasi Absolute Resolve, sebuah operasi militer AS yang diluncurkan pada 3 Januari 2026, di Caracas, Venezuela, yang menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores di bawah pasukan elit Amerika Serikat (Delta Force) dan mengangkat Delcy Rodríguez sebagai Presiden sementara Venezuela (AP News, 2026).

Lokasi pengumpulan data bukanlah lokasi geografis tetapi sekumpulan dokumen dan data global lainnya yang bersumber dari laporan media massa internasional, dari penelitian *think-tank*, dan dari dokumen hukum internasional. Dalam studi ini, penulis mengidentifikasi penculikan kepala negara sebagai contoh empiris dari *high-level operation*, dengan mempertimbangkan elemen perencanaan, pelaksanaan operasi, reaksi internasional terhadap operasi, dan kapasitas *deterrence* negara target.

Fenomena yang dipertimbangkan melibatkan (1) proses perencanaan operasi – mulai dari operasi intelijen hingga eksekusi oleh pasukan khusus (2) pelaksanaan operasi militer yang didukung oleh sistem senjata canggih dan kemampuan intelijen; dan, (3) reaksi forum internasional dalam hal legalitas operasi ini, termasuk pernyataan dari penasihat ahli hukum internasional dan pemerintah negara anggota PBB yang mempertanyakan legalitas operasi ini.

Pengumpulan data primer didukung oleh analisis pernyataan resmi dari negara, pernyataan militer AS, dan klaim hukum yang terkait dengan aktivitas tersebut. Media internasional mainstream, pendapat ahli, laporan *think tank* dan kebijakan luar negeri negara terkait sebagai sumber data sekunder digunakan untuk mengintegrasikan gambaran fenomena dengan teori yang sesuai dalam konteksnya. Pengumpulan informasi didasarkan pada analisis dokumen dari sumber primer dan sekunder, bersama dengan investigasi literatur ilmiah tentang teori strategi, realisme struktural, kapasitas *deterrence*, dan hukum internasional. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan menguji hipotesis, melalui pola hubungan kausal yang ditemukan terkait dengan kasus empiris Operasi Absolute Resolve, seperti yang dilaporkan oleh media internasional pada awal 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Operasi

Dalam artikel ini, Operasi Absolute Resolve didefinisikan sebagai high-level operation, yaitu sebagai kampanye militer yang disengaja untuk menghancurkan kekuasaan atau rezim dalam suatu negara. Menurut laporan di media internasional utama dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah AS pada awal Januari 2026, ini adalah operasi yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan Cilia Flores di wilayah Caracas. Tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan otoritas politik rezim ini bersifat simbolis (AP News, 2026).

Dari sudut pandang perencanaan operasional, operasi Absolute Resolve menunjukkan karakteristik operasi militer abad ke-21 yang disajikan oleh Norheim-Martinsen dan Nyhamar (2019) dengan biaya operasi yang rendah untuk mencapai kepentingan strategis. Operasi semacam ini dikatakan memerlukan periode panjang operasi intelijen, informasi real-time, dan perencanaan yang memprioritaskan kecepatan, akurasi, dan kerahasiaan (Norheim-Martinsen & Nyhamar, 2019).

Sebagai perbandingan empiris, operasi Neptune Spear menunjukkan bagaimana courier-lead dan operasi pasukan khusus menghasilkan outcome strategis: "Osama bin Laden is dead." Selain hasil taktis tersebut, analisis dokumen yang disita (the Abbottabad documents) memberikan bukti primer penting: "declassified documents captured during the Abbottabad raid." Di mana catatan intelijen juga menegaskan bahwa seorang individu, "the 'pacer,' fit Bin Laden's description," - bukti bahwa akurasi penjejakkan target menjadi faktor penentu dalam keberhasilan operasi decapitation (The White House, 2011).

Tujuan operasi ini adalah untuk menimbulkan efek politik, bukan untuk menciptakan perang konvensional meruntuhkan kedaulatan atau merebut teritorial negara. Unit militer yang terlibat dalam operasi ini adalah pasukan khusus Amerika Serikat (Delta Force), yaitu pasukan dengan keterampilan dan taktik aksi langsung yang mampu merebut posisi secara strategis. Keterlibatan pasukan elit menunjukkan bahwa aktivitas ini direncanakan sebagai operasi presisi tinggi dengan risiko politik dan taktis yang cukup besar yang dihitung dengan cermat. Ini mengikuti pola global penggunaan pasukan khusus sebagai satu-satunya alat untuk intervensi terbatas dalam sengketa internasional kontemporer (Norheim-Martinsen & Nyhamar, 2019).

Hasil dari operasi ini, seperti yang dilaporkan oleh pers internasional, mengakibatkan Presiden Nicolás Maduro dan Cilia Flores ditangkap dan dipaksa keluar dari Venezuela (Reuters, 2026). Secara strategis, keberhasilan tersebut mewakili keberhasilan taktis besar, karena salah satu target utama operasi-pusat kepemimpinan politik—berhasil dilumpuhkan dalam waktu singkat.

Namun pencapaian ini tidak terjadi dengan sendirinya; sangat bergantung pada kondisi struktural dunia dan kapasitas deterrence negara target. Tanggapannya terhadap operasi ini dalam hal mekanisme penegakan hukum internasional. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa relatif terbatas hanya

pada pernyataan politik dan debat normatif yang berlangsung di forum internasional. Tidak ada instrumen koersif yang secara langsung bisa menghentikan atau membatalkan hasil operasi tersebut. Fenomena ini mencerminkan keterbatasan sistem hukum internasional, sehingga secara umum dikritik dalam literatur hukum dan hubungan internasional selama beberapa dekade (Syofyan, 2017; Waltz, 1979), terutama dalam kasus tindakan yang melibatkan negara besar dengan posisi dominan di lanskap global.

Norma internasional hukum memang ada, tetapi pemaksaan institusional dari hukum-hukum ini tidak mampu menandingi militansi dan kekuatan politik negara adidaya. Tanggapan terhadap operasi ini oleh komunitas internasional menunjukkan perselisihan tajam. Majelis Umum PBB dan tim negara anggota bahkan mengadakan pertemuan darurat untuk meneliti status hukum dan pelanggaran Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan lintas batas negara kecuali diizinkan oleh Dewan Keamanan sebagai tindakan bela diri yang dibenarkan (Reuters, 2026). Kritik ini menunjukkan kerapuhan mekanisme penegakan hukum internasional di bawah aksi sepihak negara adidaya.

Operasi ini mengungkapkan kelemahan substansial dari kapasitas deterrence Venezuela. Venezuela memiliki angkatan bersenjata dan beberapa dukungan politik domestik, tetapi kemampuan membela diri tidak dapat mengatasi tindakan langsung dari negara dengan kekuatan militer dan teknologi yang jauh lebih kuat. Kurangnya aliansi pertahanan, kemampuan proyeksi kekuatan yang terbatas, dan ketergantungan pada norma hukum internasional menjadi pertahanan utama kedaulatan nasional, membuatnya terlihat sebagai sebuah negara yang sangat rentan (Schelling, 1966; Gray, 2003).

Konsekuensi strategis dari Operasi Absolute Resolve tidak hanya pada perubahan kepemimpinan politik di Venezuela. Operasi ini menekankan bahwa dalam konteks internasional yang kompetitif, dinamika kekuatan dan kemampuan angkatan bersenjata tetap menjadi faktor penentu. Dan sebaliknya, hukum internasional secara umum adalah alat legitimasi pasca-fakta. Intervensi militer modern mengembangkan operasi yang singkat, akurat, dan berorientasi pada efek strategis, dengan implikasi nyata bagi stabilitas jangka panjang kedaulatan negara dalam kelompok ukuran menengah atau kecil (Norheim-Martinsen & Nyhamar, 2019).

Oleh karena itu, Operasi Absolute Resolve dapat dilihat sebagai contoh empiris dari high-level operation yang berhasil secara taktis dan strategis karena konvergensi tiga elemen: kecanggihan perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional, dan rendahnya kapasitas deterrence negara target. Temuan ini mendukung kasus bahwa keberhasilan operasi militer tidak dapat dipisahkan dari hubungan dinamis yang melibatkan aspek operasional dan kerangka sistem internasional.

Indikator Analisis

Untuk menghindari terjebak dalam narasi yang hanya deskriptif, artikel ini memperkenalkan beberapa indikator untuk menguji hubungan antar variabel sesuai dengan paradigma teoretis. Indikator-indikator ini didasarkan pada teori strategi, kapasitas deterrence, hukum internasional, dan operasi militer kontemporer abad ke-21.

Indikator pertama adalah akurasi dan kecepatan operasi intelijen. Intelijen adalah aspek penting dalam mencapai keberhasilan dalam high-level operation yang menargetkan pemimpin negara. Efektivitas strategis modern sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah informasi yang masuk menjadi keuntungan dalam pengambilan keputusan (Gray, 2003). Keberhasilan operasi sangat bergantung pada identifikasi target yang tepat, rintangan di negara target, pantauan pergerakan target, dan penggabungan informasi lintas domain. Norheim-Martinsen dan Nyhamar (2019) lebih lanjut menggambarkan bahwa intervensi militer modern bergerak menuju operasi yang dipimpin oleh intelijen dengan ruang operasional minimal tetapi menghasilkan dampak politik maksimal. Dalam konteks Operasi Absolute Resolve, keberhasilan diukur dari kemampuan pasukan khusus menembus sistem keamanan negara target tanpa memicu pertempuran terbuka konvensional berskala luas.

Integrasi operasi lintas kecabangan dan matra adalah indikator kedua. Operasi kontemporer tidak lagi dilakukan oleh satu kecabangan saja, melainkan semua unsur kekuatan dalam militer AS termasuk pasukan khusus, dukungan udara, komunikasi, siber, dan intelijen harus dikoordinasikan dalam upaya ini. Menurut Strange (1996), keberhasilan melumpuhkan center of gravity bergantung pada kesatuan upaya dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Efek strategis dapat dicapai dengan biaya operasional yang relatif rendah ketika koordinasi lintas domain dilakukan dengan sangat baik dan adaptif. Untuk skenario ini, pasukan khusus yang didukung oleh sistem komando dan kontrol terintegrasi adalah salah satu indikator paling jelas dari kualitas komando operasi.

Indikator ketiga adalah mekanisme penegakan hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara normatif, melarang penggunaan kekuatan lintas batas secara sepihak tanpa otorisasi Dewan Keamanan atau dasar pembelaan diri (Syofyan, 2017). Namun, bukti empiris dari sistem internasional menunjukkan bahwa mekanisme penegakan sering kali gagal ketika berhadapan dengan negara-negara besar dengan kemampuan militer dominan dan memiliki hak veto. Menurut Waltz (1979), Dalam sistem internasional yang anarkis, struktur ditentukan oleh distribusi kapabilitas antarnegara, bukan oleh otoritas supranasional. Karena tidak ada lembaga yang mampu secara konsisten membatasi perilaku negara, maka resolusi Dewan Keamanan PBB menjadi indikator apakah mekanisme kolektif benar-benar membatasi negara besar atau justru merefleksikan dominasi mereka.

Indikator keempat adalah kapasitas deterrence negara target. Kapasitas deterrence bukanlah ukuran dari kekuatan militer tetapi didefinisikan sebagai ancaman pembalasan atau kesempatan untuk meningkatkan biaya strategis lawan (Schelling 1966). Seperti yang dijelaskan Gray (2003), deterrence bekerja ketika lawan dapat melihat konsekuensi yang tidak dapat diterima. Dalam kasus Venezuela, ukuran yang coba dinilai adalah kapasitas militer nasional, kemampuan proyeksi kekuatan, keberadaan aliansi pertahanan, dan stabilitas sistem politik yang membuat negara tersebut tangguh terhadap intervensi luar. Ketika elemen-elemen tersebut tidak ditemukan, maka kemungkinan intervensi ataupun agresi akan meningkat.

Indikator kelima adalah apa yang terjadi dalam konsekuensi strategis dari operasi tersebut. Efektivitas high-level operation tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kinerja terkait target taktis, seperti perolehan target. Johnston (2012) berpendapat bahwa penargetan kepemimpinan hanya efektif jika gangguan sistemik spesifik yang dihasilkannya dari pelaksanaan operasi memiliki efek pada stabilitas rezim dan keseimbangan kekuasaan di negara Venezuela.

Semua lima indikator ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan analisis. Akurasi intelijen dan integrasi lintas kecabangan dan matra menjelaskan dimensi operasional. Efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional mencerminkan dimensi sistemik. Dan kapasitas deterrence negara target adalah variabel penyeimbang. Sementara itu, konsekuensi strategis setelah operasi menunjukkan efek substantif dari penggabungan ketiga elemen ini.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian dapat membantu secara sistematis memeriksa apakah keberhasilan Operasi Absolute Resolve sebenarnya merupakan hasil dari dominasi operasional semata. Dalam analisis akhir, keberhasilan operasi bergantung pada strategi militer yang canggih, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, dan kapasitas deterrence negara target yang lemah.

Perencanaan Operasi Militer vs Kerangka Hukum Internasional Tingkat Perspektif Perang

Untuk dapat memahami sepenuhnya Operasi Absolute Resolve, analisis harus ditempatkan pada tiga tingkat peperangan: strategis, operasional, dan taktis. Ini adalah kerangka penting karena high-level operation dilihat lebih dari sekadar tindakan lintas batas yang secara hukum dipertanyakan, tetapi sebagai alat eksplisit yang sengaja dirancang dan dikalibrasi di bawah ambang perang konvensional skala penuh.

Pada tingkat strategis, tujuan operasional bukan hanya untuk menangkap orang, tetapi dampaknya pada spektrum politik yang lebih luas. Tindakan ini dapat dipahami dalam literatur strategis sebagai bentuk gangguan rezim, sinyal koersif, atau strategi decapitation (Gray, 1999; Johnston, 2012). Menargetkan kepala negara adalah serangan terang-terangan terhadap "pusat gravitasi" dalam kepemimpinan politik.

Dalam konteks realisme struktural, tindakan semacam itu merupakan penggunaan kekuatan yang mengubah alokasi kekuasaan dan membentuk kembali kalkulasi strategis pihak lain (Waltz, 1979). Jadi pada tingkat strategis, high-level operation adalah alat tekanan politik yang terukur pada tingkat strategis, bukan deklarasi perang penuh. Aspek operasional, pada tingkat operasional, adalah merancang kampanye. Termasuk di dalamnya adalah urutan perencanaan tindakan, penyisipan dan ekstraksi target, dan dominasi ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Operasi abad ke-21 kontemporer, menurut Norheim-Martinsen dan Nyhamar (2019), semakin diarahkan pada kecepatan, akurasi, dan kontrol informasi pada level operasional. Keunggulan ISR memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan mengurangi resiko kehilangan pasukan. Cetak biru operasional ini menunjukkan bahwa high-level operation telah direncanakan dan dikembangkan sebelumnya daripada inovasi dari sudut pandang taktis.

Pada tingkat taktis, operasi diwujudkan sebagai serangan tindakan langsung yang diarahkan untuk dengan cepat menetralkan perimeter keamanan dan menguasai target. Keberhasilan di sana sangat bergantung pada kejutan, koordinasi unit pasukan khusus untuk bertindak secara kolektif serta tingkat/waktu yang diperlukan untuk mengendalikan risiko eskalasi. Menurut Strange (1996), tindakan taktis yang tepat yang dihasilkan dari identifikasi akurat center of gravity dapat menghasilkan efek strategis yang jauh lebih besar daripada efektivitas operasi itu sendiri. High-level operation diposisikan pada tiga tingkat perang ini, di mana operasi dapat dilihat sebagai alat strategis di bawah ambang perang normal. Artinya, usaha ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik yang sangat substansial tanpa benar-benar memicu konfrontasi terbuka dengan skala besar.

Kerangka Perencanaan Militer

Dari sudut pandang perencanaan formal, operasi-operasi ini biasanya berjalan sesuai dengan kerangka perencanaan militer yang terstruktur. Tugas pertama, persiapan Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE), menggabungkan latar belakang politik, militer, sosial, dan geografis untuk lingkungan teater. IPOE bertujuan untuk mendeteksi pola pertahanan, struktur komando kekuatan musuh, dan kemungkinan tanggapan dari negara target. Dalam operasi militer kontemporer, keahlian terkait lingkungan informasi muncul sebagai prasyarat pertama yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan operasi (Norheim-Martinsen & Nyhamar, 2019).

Langkah berikutnya adalah menemukan Center of Gravity melalui kerangka Clausewitz, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Strange (1996). Di sini kepala negara berfungsi sebagai center of gravity politik yang memfasilitasi kesatuan rezim. Setelah mendefinisikan CoG, kerentanan penting dipetakan di mana kekurangan spesifik dapat ditemukan, yang dapat menjadi dasar untuk menetralkan center of gravity dengan biaya rendah. Ini menunjukkan bahwa high-level operation bukanlah kejadian acak tetapi keputusan strategis yang ditentukan melalui analisis sistemik. Langkah pertama dan kedua ini merupakan peran Geospatial Intelligence yang memadukan peta fisik, psikologi dan kondisional diperankan oleh National Geospatial Agency (NGA). Di mana fungsi ini memadukan informasi dari berbagai macam domain, meliputi Open-Source Intelligence, Signal Intelligence, Measurement Intelligence, dan Human Intelligence (Siswoputro et al, 2024).

Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan biaya politik dan militer. Gray (2003) menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer selalu menghasilkan risiko. Mengenai high-level operation, menegaskan penggunaan biaya militer rendah akan mengingatkan bahwa operasi militer berada dalam skala terbatas. Meskipun ada imbalan politik yang dianggap tinggi. Faktor utamanya adalah bahwa telah ada perhitungan terhadap tanggapan internasional, risiko eskalasi konflik, dan kerusakan pada reputasi internasional.

Namun kerangka perencanaan militer ini perlu diselaraskan dengan standar hukum internasional. Piagam PBB secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan militer terhadap teritorial dan kemerdekaan negara lain, seperti yang

ditemukan dalam Pasal 2(4) Piagam PBB. Pengecualian diizinkan di bawah Pasal 51 Piagam PBB, yang memberikan hak untuk membela diri terhadap serangan bersenjata, atau dengan izin Dewan Keamanan PBB (Syofyan, 2017). Dalam kasus Operasi Absolute Resolve tidak ada tanda-tanda otorisasi Dewan Keamanan. Sehingga, kurangnya mandat semacam itu membawa operasi ini ke dalam kontroversi hukum internasional.

Operasi ini juga mencerminkan konflik antara rasionalitas militer dan norma hukum internasional. Sebagai poin praktis, perencanaan operasi dilakukan sesuai dengan logika militer profesional yang metodis dan analitis. Sebaliknya, secara normatif, perilaku semacam itu sebenarnya melanggar prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan militer. Namun, dalam sistem internasional yang anarkis, apakah norma hukum akan berfungsi dengan baik atau tidak, sangat bergantung pada bagaimana kekuatan politik global didistribusikan (Waltz, 1979).

Inilah mengapa perencanaan Operasi Absolute Resolve berhubungan langsung dengan kombinasi perhitungan strategis militer versus batasan alat penegakan hukum internasional. Artinya, high-level operation di sini tidak ada sebagai tindakan lintas batas ilegal melainkan sebagai alat strategi yang dikalibrasi untuk mencapai tujuan diplomatik dan politik terbatas yang tunduk pada risiko eskalasi konflik yang masih terkendali.

Eksekusi Operasi

Operasi Absolute Resolve memiliki atribut operasi presisi tinggi yang dibangun untuk menghasilkan efek strategis melalui keterlibatan taktis terbatas. Dan pelaksanaannya, dalam konteks tindakan militer kontemporer, dicapai dengan menggabungkan taktik tindakan langsung, dominasi intelijen, dan penguasaan yang baik atas pasukan khusus.

Dari sudut pandang operasi taktis, pola yang digunakan mengikuti prinsip operasi perang kota seperti yang diuraikan dalam ATP 3-06 tentang Urban Operation, khususnya isolasi target, pengendalian titik masuk, dan netralisasi perimeter keamanan, untuk menghindari eskalasi horizontal (DoA & USMC, 2022).

Operasi tersebut berfokus pada kejutan, kecepatan, dan pengendalian ruang vertikal dan bawah permukaan di kota. Netralisasi perimeter dicapai dengan kombinasi infiltrasi terbatas dan pengendalian akses, meminimalkan tingkat interaksi bersenjata dan mengamankan target utama dalam waktu terbatas. Intelijen sangat penting. Dominasi ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) memungkinkan deteksi pola keamanan, pergerakan, dan komando internal negara target.

Dari sudut pandang strategi, operasi militer sekarang ini menjadi alat yang lebih maju ketika kita memiliki informasi yang akurat, yang mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi ketidakpastian (Gray, 1999) (Siswoputro et al., 2024). Keunggulan informasi ini memungkinkan risiko taktis yang relatif lebih rendah tetapi pengaruh politik yang tinggi.

Dari sudut pandang komando pasukan khusus, operasi dilaksanakan melalui struktur komando yang terorganisir dengan baik dan komando misi memungkinkan inisiatif oleh elemen lapangan dengan panduan tujuan strategis

yang diketahui. Paradigma ini sejalan dengan doktrin operasional saat ini yang berfokus pada adaptasi dan fleksibilitas dalam lingkungan yang kompleks. Koordinasi lintas fungsi-intelijen, manuver, perlindungan, dan dukungan terjadi sebagai siklus operasional terintegrasi tetapi terpusat dan adaptif.

Hasil taktis dari operasi ini adalah keberhasilan penangkapan kedua target utama, Presiden Nicolás Maduro dan Cilia Flores, tanpa meningkat menjadi pertempuran terbuka skala besar. Secara taktis, tujuan taktis mengikuti pengendalian target, manajemen situasi, dan ekstraksi yang dipercepat. Dalam paradigma Clausewitz-Strange, center of gravity politik dinetralkan dengan memanfaatkan kelemahan krusialnya (Strange, 1996).

Eksekusi high-level operation seperti yang tergambar dalam Operasi Absolute Resolve mencerminkan evolusi militer modern lebih dari sekadar kekuatan kinetik menuju integrasi kapabilitas lintas domain untuk mencapai decision superiority dan keunggulan tempo operasional. Dalam konsep Multi-Domain Operations (MDO), operasi tidak lagi terbatas pada satu medan, melainkan melibatkan konvergensi aset militer dan non-militer di darat, udara, laut, ruang angkasa, serta domain maya untuk menciptakan efek yang saling menguatkan dalam waktu singkat (NATO, 2024). Multi-domain command and control menekankan integrasi simultan lintas domain untuk menciptakan decision superiority melalui keunggulan tempo dan konvergensi efek (Deptula, 2019).

Dengan demikian, keberhasilan taktis operasi semacam Operasi Absolute Resolve bukan hanya hasil dari aksi unit pasukan khusus yang terlatih, tetapi juga merupakan manifestasi dari suatu operasi terpadu dalam kerangka MDO, di mana perpaduan ISR, jaringan komando terpadu (network-centric warfare), meliputi: kontrol udara, perang elektronik, dan time-sensitive targeting dikombinasikan untuk menciptakan keunggulan tempo dan keputusan di atas lawan. Kelebihan ini membuktikan bahwa operasi modern tidak lagi hanya soal kekuatan fisik, melainkan dominasi informasi dan tempo yang memungkinkan pelaksana beroperasi lebih cepat menghasilkan decision superiority (Borne, 2019).

Namun yang paling penting adalah dampak strategis yang dihasilkan. Yaitu, penangkapan kepala negara secara langsung mengancam legitimasi dan stabilitas rezim. Johnston (2012) menunjukkan bahwa strategi decapitation dinilai sukses jika menghasilkan lebih dari kemenangan taktis dan menciptakan ketidakstabilan sistemik. Dalam pengertian ini, efeknya mencapai pergeseran perhitungan politik domestik, dan tindakan balasan regional, hingga penguatan pesan koersif kepada aktor lain dalam sistem internasional.

Jika ditarik ke Indonesia, Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi (2020) berfokus pada kewajiban kekuatan yang sah berdasarkan alasan politik, di bawah hukum domestik dan dalam tujuan militer yang jelas. Dalam doktrin ini, operasi militer—OMP dan OMSP—tidak pernah berjalan tanpa panduan melalui mata kepentingan pertahanan nasional dan kedaulatan (Mabes AD, 2020). Prinsip ini menggambarkan perbedaan kunci antara intervensi yang dilakukan secara eksternal dan penggunaan kekuatan dalam kerangka pertahanan nasional Indonesia. Dengan cara yang sama, Doktrin Fungsi Umum

Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut (2021) menyatakan bahwa "dukungan sistem komunikasi dan elektronika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan operasional dan pengendalian operasional" (Mabes AL, 2021).

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, kegiatan militer sebenarnya telah mengintegrasikan koordinasi komando, komunikasi, dan pengendalian sebagai persyaratan inti untuk keberhasilan taktis dan stabilitas dalam lingkungan pasca-operasi.

Jadi cara Operasi Absolute Resolve dilakukan menunjukkan bahwa high-level operation didasarkan pada tiga faktor kunci: dominasi intelijen, komando pasukan khusus yang adaptif, dan integrasi presisi tinggi dari taktik perang kota. Dengan kata lain, pencapaian taktis ini diubah menjadi konsekuensi strategis dengan membuat center of gravity politik tidak stabil. Namun, dalam persaingan internasional saat ini, pola tersebut menunjukkan bahwa, dengan desain dan pelaksanaan operasi terbatas, tetapi dapat menghasilkan dampak politik yang setara dengan operasi militer dalam skala luas.

Negara Menengah, Hukum Internasional, dan Reaksi Internasional

Negara-negara menengah yang bergantung pada norma hukum internasional sebagai dasar struktural bagi kedaulatan mereka sangat berisiko jika mereka gagal melakukan deterrence. Dalam konteks ini, Venezuela dapat mengalami tekanan internal dan eksternal. Ketergantungan pada Piagam PBB sebagai sarana penerapan hukum internasional tidak memberikan jaminan bahwa negara-negara menengah menikmati perlindungan yang nyata kecuali jika yang terakhir didukung oleh kekuatan militer yang kredibel atau aliansi strategis. Ketika kriteria non-intervensi dibayangi oleh penggunaan kekuasaan, kesan kerentanan strategis negara-negara menengah menjadi lebih tajam.

Kegagalan hukum internasional juga sangat disorot dalam peristiwa Operasi Absolute Resolve. Piagam PBB dengan jelas melarang penggunaan tindakan bersenjata yang akan melanggar integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain tanpa izin Dewan Keamanan atau pembenaran dalam pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 2(4) dan Pasal 51 Piagam PBB (Syofyan, 2017). Namun dalam kasus ini, tidak ada otoritas Dewan Keamanan yang memberikan legitimasi paksaan pada tindakan tersebut.

Para ahli hukum menganggap bahwa ada pelanggaran yang jelas dan koheren terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional ketika pelanggar hukum asing tidak dapat melaksanakan operasi mereka tanpa mandat yang jelas, meskipun pejabat pelaksana membenarkan tindakan mereka secara sepihak sebagai bagian dari penegakan hukum nasional yang sama terhadap seseorang yang dituduh melakukan kejahatan transnasional (Hukum online, 2026).

Para pakar PBB untuk hak asasi manusia dan hukum internasional mengecam tindakan militer AS, menilai penggunaan kekuatan terhadap wilayah Venezuela dan penculikan Presiden Maduro beserta istrinya sebagai pelanggaran prinsip fundamental hukum internasional, termasuk hak atas hidup dan kedaulatan negara (OHCHR, 2026). Uni Eropa (European Union - EEAS) menegaskan bahwa Piagam PBB dan hukum internasional harus dihormati oleh

semua pihak, serta menyerukan ketenangan dan upaya penyelesaian damai di Venezuela setelah intervensi militer AS. Uni Eropa juga menyatakan bahwa keinginan rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri harus dihormati (European External Action Service, 2026).

Ada pengulangan seruan setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, di mana sebagian besar anggota mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran Pasal 2 Piagam PBB dan memperingatkan bahwa normalisasi perubahan rezim melalui kekuatan dapat menyebabkan kekerasan serius (Antara News, 2026). Bahkan Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat atas tindakan militer tersebut, di mana beberapa anggota Dewan menyatakan kekhawatiran serius bahwa intervensi tersebut dapat melanggar prinsip kedaulatan negara dan Piagam PBB, serta menimbulkan preseden berbahaya bagi keamanan internasional (Kontan.co.id, 2026).

Sebaliknya, reaksi beragam dan terpolarisasi, dari dukungan atau posisi netral oleh beberapa negara yang menganggap perubahan rezim sebagai peluang strategis atau hasil dari kekuatan politik domestik Venezuela. Respon semacam itu menggambarkan fakta bahwa sistem internasional terfragmentasi dalam menghadapi pelanggaran hukum internasional, termasuk ketika pertimbangan politik, keamanan, atau ekonomi terlibat.

Singkatnya, operasi ini sebenarnya mencerminkan kerapuhan struktural negara-negara menengah, kurangnya kapasitas untuk respon internasional dalam mekanisme penegakan hukum, dan fragmentasi respon internasional menyoroti kesulitan tatanan hukum global dalam mengatur aktor berkapabilitas tinggi dan tindakan paksaan lintas batas.

Analisa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Operasi Absolute Resolve tidak dapat dipisahkan dari sifat anarkis sistem internasional, seperti yang ditunjukkan dalam realisme struktural. Waltz (1979) berpendapat bahwa dalam sistem tanpa otoritas supranasional yang efektif, distribusi kekuasaan menjadi sangat penting dalam perilaku negara. Dalam hal ini, negara-negara dengan kemampuan militer dan politik yang besar lebih bebas dalam tindakan mereka, bahkan menggunakan kekuatan lintas batas.

Norma hukum internasional masih berlaku secara formal, tetapi kekuatan penegakannya sangat dipengaruhi oleh bentuk keseimbangan kekuasaan global. Buktinya adalah bahwa norma dapat diabaikan. Negara-negara adikuasa memiliki keunggulan militer, sementara ancaman pembalasan negara target kecil, maka praktik-praktik semacam ini akan dijalankan. Larangan penggunaan kekuatan dalam Pasal 2(4) Piagam PBB tetap menjadi norma fundamental, namun praktik negara menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan kalkulasi strategis (Gray, 2018).

Secara strategis, Gray (1999) melihat strategi sebagai jembatan antara tujuan politik dan senjata militer. Strategi decapitation memang dapat meningkatkan fragmentasi organisasi bersenjata, namun efeknya bersifat kondisional dan bergantung pada struktur jaringan serta kapasitas regenerasi kepemimpinan (Johnston & Sarbahi, 2016).

Operasi Absolute Resolve adalah ilustrasi strategi yang efektif: tindakan militer dimaksudkan untuk memiliki dampak politik langsung dengan memfokuskan pada center of gravity di jajaran pemimpin politik. Keberhasilan taktis – menculik kepala negara – diterjemahkan ke dalam efek strategis yang terwujud dalam gangguan struktur kekuasaan dan penyesuaian terhadap perhitungan politik domestik dan regional. Ini menegaskan klaim operasi militer kontemporer yang diarahkan tidak hanya untuk membongkar kemampuan numerik dan teknis lawan, tetapi juga untuk memodifikasi lingkungan politik mereka dengan cepat dan terukur.

Di sisi lain, keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional memperparah kerentanan kedaulatan negara-negara berkapasitas menengah. Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan militer untuk merebut integritas teritorial negara lain (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945). Seperti yang dicatat dalam literatur tentang hukum internasional, dampak norma ini adalah fungsi dari kemauan politik dan konsensus Dewan Keamanan PBB (Syofyan, 2017). Namun karena tidak ada otorisasi dan tidak ada instrumen koersif untuk mencegah operasi militer, maka norma hukum kehilangan kekuatan pencegah efektifnya. Dalam skenario seperti itu, ketika negara-negara hanya mengejar perlindungan normatif dengan kemampuan strategis rendah, mereka menjadi rentan terhadap campur tangan negara adidaya.

Kapasitas deterrence sangat penting dan dengan demikian terkait dengan konsep kedaulatan. Schelling (1966) menekankan bahwa deterrence bekerja jika mampu meningkatkan biaya dan risiko bagi pihak-pihak yang berniat agresif. Gray (2003) menambahkan bahwa kredibilitas deterrence bergantung pada kombinasi kemampuan, kemauan politik, dan bagaimana musuh melihatnya.

Bagi negara target, kapasitas proyeksi kekuatan yang terbatas dan tidak adanya aliansi pertahanan yang kuat menurunkan kekuatan deterrence nya. Oleh karena itu, kemampuan deterrence yang rendah juga meningkatkan prevalensi negara-negara superior, karena perhitungan ancaman mereka terbatas. Meskipun demikian, efektivitas deterrence tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan kapabilitas militer, tetapi oleh postur strategi yang jelas dan kredibel dalam memproyeksikan pembalasan (Narang, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan High-Level Operation dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu: kecanggihan perencanaan dan eksekusi operasi, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, serta kapasitas deterrence negara target. Dalam sistem internasional yang anarkis, distribusi kekuatan menjadi penentu utama perilaku negara (Waltz, 1979). Ketika negara adidaya memiliki keunggulan intelijen, mobilitas pasukan khusus, dan superioritas teknologi, serta menghadapi respons internasional yang terbatas secara koersif, maka peluang keberhasilan operasi meningkat.

Dalam perspektif strategi, operasi militer merupakan instrumen politik untuk menghasilkan efek strategis (Gray, 1999). Beberapa literatur menunjukkan bahwa dalam konflik asimetris, pemimpin negara menjadi center of gravity karena berfungsi sebagai simpul komando, legitimasi, dan kohesi organisasi (Clausewitz,

1976; Strange, 1996). Strategi decapitation—yakni penargetan pemimpin untuk melumpuhkan struktur komando—diidentifikasi sebagai salah satu pola high-level operation modern yang berorientasi pada efek strategis (Johnston, 2012).

Dalam konteks Indonesia, strategi decapitation terhadap pimpinan kelompok separatis bersenjata pernah dilakukan dalam penangkapan pemimpin jemaah MIT di Poso yang mengakhiri perlawanan kelompok teror ((Sahasrad & Chaidar, 2016). Namun operasi decapitation belum secara eksplisit ditetapkan sebagai kebijakan utama dalam mengatasi konflik di dalam negeri. Secara konseptual pendekatan tersebut relevan untuk dipertimbangkan apabila pemimpin terbukti menjadi center of gravity yang menentukan daya tahan organisasi. Sebab penangkapan atau netralisasi pimpinan berpotensi menciptakan disrupsi komando, fragmentasi jaringan, dan penurunan moral kelompok (Johnston, 2012).

Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan high-level operation (Y) meningkat dengan kecanggihan rencana dan pelaksanaan operasi (X1), ditunjang oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional (X2). Sedangkan kapasitas deterrence negara target (Z) bertindak sebagai faktor pengurang dalam menyebabkan probabilitas keberhasilan operatif menurun.

Pernyataan ini bukan model matematika kuantitatif, tetapi gambaran konseptual hubungan kausal antara variabel-variabel. Oleh karena itu, analisis teoretis juga mengungkapkan bahwa apabila dalam sistem internasional dengan distribusi kekuasaan yang sangat tidak berimbang, dan jika biaya kebijakan luar negeri untuk negara-negara tersebut lebih rendah, maka negara-negara kuat akan lebih cenderung mengabaikan norma dan tetap melanjutkan operasi. Ini menggambarkan bahwa kedaulatan negara-negara berukuran menengah bukan hanya fungsi dari pelanggaran norma, tetapi lebih merupakan ketidakseimbangan kekuatan yang melekat dan penyalahgunaan norma.

Pelajaran untuk Indonesia

Implikasi bagi Indonesia adalah perlunya memperkuat kapasitas deterrence multidomain meliputi kemampuan intelijen, kesiapan operasional angkatan bersenjata, kerjasama pertahanan, dan diplomasi internasional. Tanpa kapasitas deterrence yang kredibel, negara akan menghadapi kerentanan strategis. Dan sebaliknya, dengan kapasitas deterrence yang kuat akan meningkatkan biaya dan risiko bagi pihak yang mencoba melakukan agresi atau intervensi (Schelling, 1966; Gray, 2003).

Dengan demikian, kebijakan pertahanan Indonesia perlu berpijak pada realisme strategis dengan cara: membumikan konsep MDO (Multi Domain Operation) melalui integrasi intelijen, geospasial, dan teritorial, meningkatkan kemampuan operasi angkatan bersenjata, memperluas kerjasama pertahanan, mengembangkan aspek diplomasi, serta memastikan setiap opsi strategis—termasuk strategi decapitation—dirancang sebagai instrumen politik yang terukur dan terkendali dalam kerangka pertahanan negara.

Lebih lanjut dalam mengatasi konflik di dalam negeri, pengalaman operasi di Papua menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan keamanan sangat bergantung pada perencanaan operasi yang matang. Perencanaan operasi ini meliputi penguasaan informasi medan dan struktur jaringan kelompok bersenjata.

Pemanfaatan Geospatial Intelligence, meskipun belum optimal, akan meningkatkan akurasi perencanaan operasi dan efektivitas cara bertindak (Siswoputro et al., 2024). Dan apabila kepemimpinan kelompok separatis atau ditetapkan sebagai center of gravity, maka pola high-level operation berbasis strategi decapitation dapat dipertimbangkan sebagai opsi operasi tempur terbatas, yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan legitimasi hukum nasional dan stabilitas sosial.

REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati dalam membaca temuan dan implikasinya.

1. Pertama, studi ini menggunakan desain single case study dan dua kasus pembanding empiris (kasus Osama bin Laden dan Santoso) dengan pendekatan kualitatif eksplanatori berbasis pelacakan proses. Meskipun pendekatan ini memungkinkan identifikasi mekanisme kausal secara mendalam, generalisasi temuan terhadap seluruh fenomena high-level operation dalam konteks global tetap bersifat analitis, bukan statistik.
2. Kedua, data empiris yang digunakan sebagian besar bersumber dari dokumen terbuka, laporan media internasional, serta pernyataan resmi pemerintah dan organisasi internasional. Ketiadaan akses terhadap dokumen dengan klasifikasi militer, rekaman perencanaan operasional internal, maupun notulensi deliberasi Dewan Keamanan PBB membatasi kemampuan verifikasi menyeluruh terhadap variabel perencanaan dan koordinasi lintas domain.
3. Ketiga, model konseptual yang dirumuskan ($Y = X1 + X2 - Z$) merupakan simplifikasi analitis hanya untuk menggambarkan relasi kausal antara variabel, yaitu: kecanggihan operasional, kelemahan penegakan hukum internasional, dan kapasitas deterrence negara target.
4. Keempat, variabel kapasitas deterrence dalam penelitian ini dianalisis dalam kerangka konvensional dan strategis secara umum, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap indikator spesifik seperti rasio proyeksi kekuatan, indeks kesiapan militer, atau perhitungan keseimbangan kekuatan regional.
5. Kelima, penelitian ini berfokus pada dimensi strategis dan operasional, sehingga belum mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional, legitimasi rezim pasca-operasi, maupun dinamika hukum internasional setelah preseden tersebut terbentuk.

REFERENCES

- Antara News. (2026, 23 Februari). PBB: Operasi militer AS di Venezuela rusak hukum internasional. Antara News.
<https://www.antaranews.com/berita/5338357/pbb-operasi-militer-as-di-venezuela-rusak-hukum-internasional>
- AP News. (2026, January). What we know about a US strike that captured Venezuela's Maduro and what comes next.
<https://apnews.com/article/venezuela-us-maduro-what-to-know-a57528ff315a7f70ed51a1721f5e0bc2>
- Borne, K. D. (2019). Targeting in multi-domain operations. *Military Review*, 99(3), 60–67.
- British Parliamentary Library. (2026). The US capture of Nicolás Maduro.
<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10452>
- Chatham House. (2026). The US capture of President Nicolás Maduro and attacks on Venezuela have no justification.
<https://www.chathamhouse.org/2026/01/us-capture-president-nicolas-maduro-and-attacks-venezuela-have-no-justification>
- Clausewitz, C. von. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Karya asli diterbitkan 1832).
- Department of the Army & United States Marine Corps. (2022). ATP 3-06/MCTP 12-10B Urban operations.
- Deptula, D. A. (2019). Multi-domain command and control: Creating decision superiority. *Air & Space Power Journal*, 33(2), 5–14.
- Detik-detik Pasukan Elite Delta Force AS Tangkap Presiden Venezuela Maduro – tersedia di Detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-8291099/detik-detik-pasukan-elite-delta-force-as-tangkap-presiden-venezuela-maduro>

- European External Action Service. (2026, 4 Januari). Venezuela: Statement by the High Representative on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela. https://www.eeas.europa.eu/eeas/venezuela-statement-high-representative-aftermath-us-intervention-venezuela_en?
- Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. Cambridge University Press.
- Gray, C. (2018). International law and the use of force (4th ed.). Oxford University Press.
- Gray, C. S. (1999). Modern strategy. Oxford University Press.
- Gray, C. S. (2003). Maintaining effective deterrence. U.S. Army War College Press.
- Hampir 50 Tentara Venezuela Tewas dalam Operasi Penculikan Maduro oleh AS – tersedia di MetroTVNews.
- Hukum online. (2026, Januari). Tidak punya Yuridiksi, AS dinilai tak berwenang adili Presiden Nicolas Maduro. Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-punya-yurisdiksi--as-dinilai-tak-berwenang-adili-presiden-nicolas-maduro-lt695be03222552/>
- Johnston, P. B. (2012). Does decapitation work? Assessing the effectiveness of leadership targeting in counterinsurgency campaigns. *International Security*, 36(4), 47–79.
- Johnston, P. B., & Sarbahi, A. K. (2016). The impact of US drone strikes on terrorism in Pakistan. *International Studies Quarterly*, 60(2), 203–219.
- Jordan, J. (2009). When heads roll: Assessing the effectiveness of leadership decapitation. *Security Studies*, 18(4), 719–755.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Indonesian Defence White Paper 2015. Kementerian Pertahanan RI.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022.
- Kontan.Co.id (2026, Januari). Dewan Keamanan PBB gelar rapat darurat usai AS serang Venezuela. <https://internasional.kontan.co.id/news/dewan-keamanan-pbb-gelar-rapat-darurat-usai-as-serang-venezuela?>
- Markas Besar Angkatan Darat. (2020). Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.
- Markas Besar Angkatan Laut. (2024). Doktrin Fungsi Umum Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut.
- Milevski, L. (2021). Colin S. Gray, Deterrence, and Contingency. *Comparative Strategy*, 40(2), 145-149.
- Narang, V. (2014). *Nuclear strategy in the modern era: Regional powers and international conflict*. Princeton University Press.
- NATO. (2024). Multi-Domain Operations in NATO– Explained. <https://www.act.nato.int/article/mdo-in-nato-explained/>
- Norheim-Martinsen, P. M., & Nyhamar, T. (2019). *International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and The Future of Intervention*. Routledge.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026, 7 Januari). UN experts condemn US aggression against Venezuela. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/un-experts-condemn-us-aggression-against-venezuela>
- Reuters. (2026, 3 January). Was the US capture of Venezuela’s president legal? <https://www.reuters.com/world/us/was-us-capture-venezuelas-president-legal-2026-01-03/>

- Sahrasad, H., & Chaidar, A. (2016). Terorisme, akhir sejarah Santoso dan masa depan teror di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 347–366.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and influence*. Yale University Press.
- Siswoputro, S., Suseto, B., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2024). Fortification of civil-military cooperation through utilization of geospatial intelligence concepts in dealing with armed criminal groups in Papua. *Jurnal Pertahanan*, 10(1), 54–76.
- Snow, D. M. (2018). *Cases in international relations: Principles and applications* (7th ed.). Rowman & Littlefield.
- Strange, J. (1996). *Centers of gravity & critical vulnerabilities: Building on the Clausewitzian foundation*. Marine Corps University.
- Syofyan, A. (2017). *Hukum internasional*. PusKaPu.
- The White House. (2011). Remarks by the President on Osama bin Laden. The White House (Obama Administration). <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/05/02/osama-bin-laden-dead>
- U.S. Department of Defense. (2018). *Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America*. Department of Defense.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- Waldner, D., & Lust, E. (2018). *What is process tracing?* University of Pennsylvania Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.